

MANAJEMEN PROYEK PENINGKATAN PENGETAHUAN PENGUJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Heni Marini¹, Rizma Adlia Syakurah²

¹Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya,
Palembang

²Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, Palembang
Corresponding Author: rizma.syakurah@gmail.com

ABSTRAK: Sebagai upaya penyederhanaan birokrasi, Pemerintah menetapkan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Dibutuhkan penilaian kompetensi dalam pengembangan karir pegawai sehingga penguji kompetensi perlu memiliki kemampuan yang terstandarisasi. Masih ditemukan penguji yang belum memiliki kemampuan yang berstandar dikarenakan tidak semua penguji telah mengikuti pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan pengetahuan penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan melalui pelatihan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di UPTD Bapelkes Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 21-26 Juni 2021. Objek yang diteliti yaitu pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi penguji jabatan fungsional kesehatan. Sampel dalam penelitian yaitu sebanyak 29 orang. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan manajemen proyek. Pada tahap evaluasi, dilakukan teknik pengumpulan data menggunakan tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*). Data yang didapatkan diuji menggunakan Uji *Paired Sample T-Test*. Data kemudian disajikan secara deskriptif. Kegiatan pelatihan dilakukan karena kurangnya penguji kompetensi jabatan fungsional yang telah mengikuti pelatihan terstandar. Implementasi kegiatan dimulai dengan mengadakan pelatihan bagi peserta yang menjadi perwakilan setiap Fasyankes di Sumatera Selatan. Pengetahuan peserta akan dibandingkan melalui tes awal dan tes akhir. Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan didapatkan bahwa 29 peserta yang mengikuti pelatihan telah mengalami peningkatan pengetahuan mengenai standar kompetensi pada jabatan fungsional. Ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, yaitu fasilitator yang kurang baik dalam menyampaikan materi serta keterlambatan penyediaan konsumsi bagi peserta. Diharapkan kepada peserta untuk dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama pelatihan serta kepada tim kerja untuk dapat menentukan fasilitator yang lebih luwes dalam menyampaikan materi.

Kata Kunci : Jabatan Fungsional, Manajemen Proyek, Pelatihan

ABSTRACT : *The government sets an equalization of administrative roles to functional positions to streamline the bureaucracy. Employee career advancement requires competency evaluation, hence competency examiners must possess standardized skills. Because not all examiners attended the training, there are still some examiners who lack standardized abilities. This study examines initiatives to improve the training of health functional competency examiners' expertise. Descriptive qualitative research is what this study is. From June 21 to June 26, 2021, the research was carried out in the UPTD Bapelkes South Sumatra Province. The implementation of training exercises for functional position examiners in the health sector was the subject of the study. 29 persons made up the study's sample. A project management methodology is used to carry out the activities. An early test (*pre-test*) and a final test were used to collect data during the implementation stage (*post-test*). The Paired Sample T-Test was used to analyze the data that was obtained. The data is then shown descriptively. Due to a dearth of functional position competency examiners who have completed standardized training, the training activities are being conducted. The activity's implementation started with training sessions for participants who represented each South Sumatra health service facility. With the use of the pre-test, participants' knowledge will be compared to the post-test. 29 participants in the training showed increased knowledge of competency standards for functional positions, according to the findings of the training activities. The implementation of training exercises was hampered by several issues, including a poor facilitator and a delay in supplying refreshments to participants. In addition to the work team being able to choose a facilitator who is more adaptable in how they teach the information, it is intended that the participants will be able to put the knowledge they learned during the training into practice.*

Keywords : *Functional Positions, Project Management, Training*

PENDAHULUAN

Penyederhanaan birokrasi melalui kesetaraan jabatan administrasi dalam jabatan fungsional diperlukan untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik dan lebih dinamis (Isra, 2022),(Permatasari & Ariani, 2021). Pengembangan karir ke jabatan fungsional membutuhkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan (Nuryanto et al., 2022). Pengembangan karir dibutuhkan karena lingkup pekerjaan jabatan fungsional cukup luas dan membutuhkan kemampuan yang terstandarisasi di bidangnya (Tim Website Dinkes, 2020).

Hingga saat ini, para penguji kompetensi jabatan fungsional masih banyak yang belum mendapatkan pelatihan (Timur, 2021). Berdasarkan kebutuhan dari tim penguji, diperlukan adanya pelatihan sebagai bekal dalam menguji kompetensi pada jabatan fungsional (Muslimin, 2020). Pelatihan tersebut pun masih sulit dilakukan karena penetapan kurikulum pelatihan bagi penguji kompetensi jabatan fungsional belum ditetapkan (Badan PPSDM Kesehatan, 2020).

Ditemukan beberapa kendala dalam kegiatan pelatihan penguji kompetensi jabatan fungsional di UPTD Bapelkes Sumatera Selatan, yaitu tenaga penguji kompetensi dalam jabatan fungsional masih kurang serta tidak semua penguji kompetensi jabatan fungsional telah mengikuti pelatihan. Selain itu, pelaksanaan uji kompetensi masih menggunakan metode lama, yaitu menggunakan portofolio pada 6 jabatan fungsional kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya peningkatan pengetahuan penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan melalui pelatihan tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di UPTD Bapelkes Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 21-26 Juni 2021. Objek yang diteliti yaitu pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi penguji jabatan fungsional kesehatan. Sampel dalam penelitian yaitu sebanyak 29 orang. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan manajemen proyek yang terdiri dari tahap inisiasi kegiatan, tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap monitoring dan supervisi serta tahap evaluasi dan pelaporan.

Tahap inisiasi kegiatan diawali dengan melakukan identifikasi masalah yang terjadi. Pada tahap

implementasi, dilakukan pelatihan melalui metode ceramah dan diskusi bersama peserta. Evaluasi kegiatan menggunakan teknik pengumpulan data tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*). Data yang didapatkan diuji menggunakan Uji *Paired Sample T-Test*. Data kemudian disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Inisiasi Kegiatan

Tahap inisiasi kegiatan merupakan tahapan awal kegiatan dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi (Pebriyanti & Syakurah, 2022). Terdapat beberapa kesenjangan yang ditemukan pada kegiatan pelatihan kompetensi pada tenaga fungsional kesehatan di UPTD Bapelkes Provinsi Sumatera Selatan, antara lain masih kurangnya tenaga penguji kompetensi di jajaran jabatan fungsional di Kabupaten/Kota, belum semua penguji kompetensi mengikuti pelatihan yang terstandarisasi serta pelaksanaan uji kompetensi baru menggunakan metode portofolio terhadap 6 jabatan fungsional kesehatan.

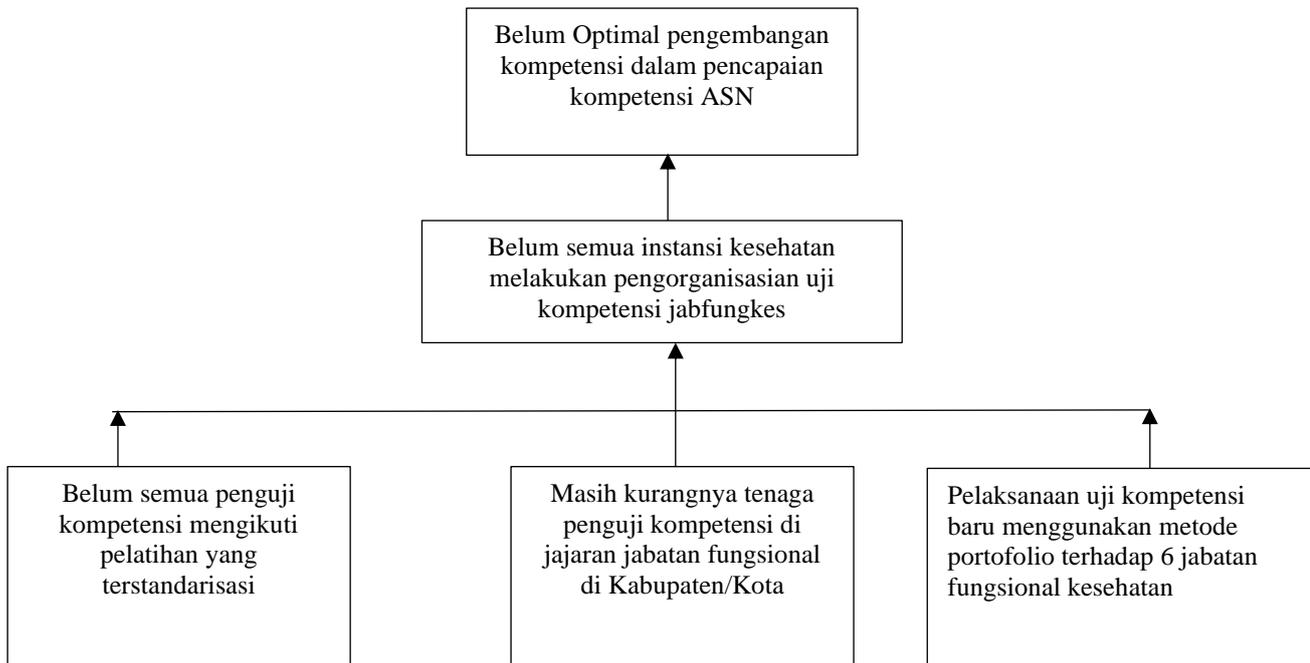
Berdasarkan identifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan kegiatan, maka dibuat tabel prioritas masalah menggunakan tabel USG seperti tabel 1 berikut.

Tabel 1. Prioritas Masalah

No	Masalah Pokok	U	S	G	TTL	Prioritas
1	Masih kurangnya tenaga penguji kompetensi di jajaran jabatan fungsional di Kabupaten/Kota	5	5	4	14	I
2	Belum semua penguji kompetensi mengikuti pelatihan yang terstandarisasi	5	4	4	13	II
3	Pelaksanaan uji kompetensi baru menggunakan metode portofolio terhadap 6 jabatan fungsional kesehatan	4	4	4	12	III

Prioritas masalah yang ditemukan kemudian akan dibentuk pohon masalah seperti gambar 1 berikut.

MANAJEMEN PROYEK PENINGKATAN PENGETAHUAN PENGUJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN



Gambar 1. Pohon Masalah Kurangnya Pengetahuan Penguji Kompetensi pada Jabatan Fungsional

Tabel 2. Cost Benefit Analysis

No	Alternatif	Manfaat (Benefit)	Biaya (Cost)	Ratio
1	Masih kurangnya tenaga penguji kompetensi di jajaran jabatan fungsional di Kabupaten/Kota	5	2	2,5
2	Belum semua penguji kompetensi mengikuti pelatihan yang terstandarisasi	4	4	1
3	Pelaksanaan uji kompetensi baru menggunakan metode portofolio terhadap 6 jabatan fungsional kesehatan	3	4	0,75

Tabel 3. Jadwal Inisiasi Kegiatan

No	Tahapan	Waktu
1	Pertemuan Rencana Pelatihan Internal Kesehatan di	Juni 2020

2	UPTD Bapelkes Provinsi Sumatera Selatan Pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan Bagi Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	November 2020
3	Usulan Rencana Kebutuhan Pelatihan Kesehatan Ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	November 2020
4	Pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran	November 2020
5	Penyusunan DIPA (Dokumen Induk Pengeluaran Anggaran) oleh bagian perencanaan	November 2020
6	Rapat Koordinasi dengan Puslat SDMK dalam pengembangan kompetensi ASN Bidang Kesehatan	Desember 2020
7	Pemberitahuan Pelatihan Sudah di ijinkan dilaksanakan	Maret 2021
8	Penjadwalan Kegiatan Pelatihan	Maret 2021
9	Pengusulan Akreditasi Pelatihan Bagi Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan melalui SIAKPEL	April 2021

(Kerangka Acuan
Pelatihan, Jadwal Kegiatan,
Draft Nama Fasilitator

Tahap Perencanaan

Kegiatan awal yang dilakukan dalam tahap perencanaan yaitu menetapkan tim kerja yang akan memantau selama kegiatan diselenggarakan. Tim kerja yang terlibat seperti tabel 4 berikut.

Tabel 4. Tim Pelaksana Kegiatan

Peserta	Tugas
Kepala Bapelkes	a) Menandatangani surat menyurat b) Berkoordinasi dengan Kasi Tata Operasional mengenai hal-hal dalam pelatihan
Kasi Tata Operasional	a) Berkoordinasi dengan panitia dalam persiapan pelatihan
Kasi Akreditasi	a) Berkoordinasi dengan panitia mengenai akreditasi pelatihan
Kasubag Tata Usaha	a) Berkoordinasi dengan panitia mengenai sarana dan prasarana pelatihan serta penunjang pelatihan lainnya
Bendahara	a) Berkoordinasi dengan Kepala Bapelkes dan panitia mengenai pertanggungjawaban ATK, Modul, Akomodasi dan Konsumsi Pelatihan
Panitia	a) Membuat surat keputusan (SK) penyelenggara pelatihan b) Membuat kerangka acuan sesuai dengan kurikulum, dan jadwal yang dibuat oleh MOT c) Membuat surat pemanggilan peserta d) Membuat surat permohonan fasilitator/narasumber e) Membuat surat permohonan membuka pelatihan serta surat undangan kegiatan
MOT	a) Membuat jadwal kegiatan

Setelah tim kerja ditentukan, maka panitia kegiatan akan mengadakan pertemuan guna membicarakan pelaksanaan kegiatan. Panitia menyiapkan hal-hal penting dalam proses pelatihan seperti kerangka acuan, jadwal serta form evaluasi. Undangan kegiatan disebarkan kepada seluruh Rumah Sakit Pemerintah di

seluruh Provinsi Sumatera Selatan serta diminta kepada seluruh Rumah Sakit untuk menyiapkan peserta yang akan mengikuti kegiatan. fasilitator dan narasumber disiapkan dengan kriteria yang sesuai dengan kurikulum pelatihan.

Tahap Implementasi

Pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan dilakukan pada tanggal 21-21 Juni 2021 di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan bertempat di ruang Auditorium Gedung Bapelkes Prov. Sumsel Jl. Brigjen DR.H.Noemir Km. 06 Lebong Siareng Palembang. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan aturan di masa pandemi covid-19 yaitu semua peserta wajib menunjukkan hasil tes swab yaitu antigen negatif di awal kegiatan maupun di akhir kegiatan. selain itu, peserta diharuskan untuk melakukan pengecekan suhu tubuh dan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Jumlah peserta yang diikutsertakan pada pelatihan ini terdiri dari 30 orang, namun 1 orang mengkonfirmasi pengunduran diri dan 1 orang mengikuti pembelajaran secara daring. 28 orang lainnya mengikuti pelatihan secara tatap muka.

Tim fasilitator dan MOT pada pelatihan bagi penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan tahun 2021 berasal dari RS Ernaldy Bahar Palembang dan Dinas Kesehatan Kab. Ogan ilir dimana seluruh fasilitator akan di Swab Antigen 1 hari sebelum kegiatan pelatihan Quality Control (QC) Pelatihan Bagi Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan bertugas memantau proses pelatihan dari mulai persiapan, pelaksanaan kesesuaian antara jadwal, peserta, fasilitator, hingga materi yang disampaikan saat pelaksanaan pelatihan. Pembiayaan pelatihan bagi penguji kompetensi dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan bagi tim penguji jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Checklist Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

No	Kegiatan	Telah Terlaksana	Belum Terlaksana
1	Membuat daftar hadir peserta, panitia, dan fasilitator	√	
2	Menerima Pendaftaran peserta	√	
3	Membuat rekap biodata peserta, panitia, dan fasilitator	√	
4	Monitoring pengajar dan DS hari berikutnya	√	

MANAJEMEN PROYEK PENINGKATAN PENGETAHUAN PENGUJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

- | | | |
|----|--|---|
| 5 | Membuat SPJ Narasumber pusat dan fasilitator | √ |
| 6 | Merekap hasil evaluasi dan hasil ujian akhir | √ |
| 7 | Membagi dan Merekap evaluasi penyelenggara | √ |
| 8 | Membagi dan merekap evaluasi fasilitator | √ |
| 9 | Operasional AVA | √ |
| 10 | Menyebarkan absen peserta setiap ganti materi | √ |
| 11 | Membagikan evaluasi peserta dan evaluasi penyelenggara | √ |

Tahap Monitoring dan Supervisi

Monitoring merupakan sebuah proses pengumpulan data dengan tujuan mengukur kemajuan dari sebuah kegiatan. Monitoring juga digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahapan ini juga bermaksud untuk mengupayakan agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dicapai sebaik mungkin (Prasanto, 2021). Proses dasar dalam monitoring meliputi 3 tahap seperti pada gambar 3 berikut.

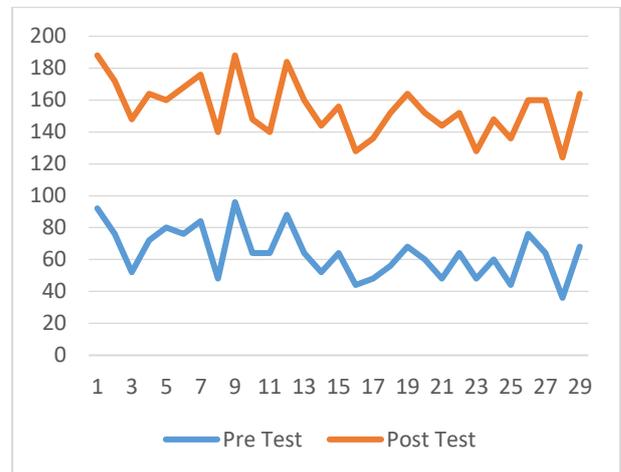


Gambar 2. Tahap Dasar Monitoring

Setiap monitoring dilakukan, maka akan dibuat laporan hasil yang berisi pengantar, daftar isi, laporan hasil kegiatan monitoring serta kesimpulan dan saran. Indikator keberhasilan dalam kegiatan monitoring yaitu mencakup pencapaian target serta aktivitas selama kegiatan (Aditya et al., 2021). Pelaporan selama monitoring diharapkan dapat membantu tim kerja ketika ada kesalahan sehingga dapat diperbaiki secepatnya (Megawaty, 2020).

Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi kegiatan didapatkan dari hasil penilaian ketika kegiatan telah berakhir (Novia & Syakurah, 2022). Rapat dilakukan pada penelitian ini untuk membahas mengenai kegiatan selama pelatihan. Evaluasi kegiatan dilakukan setiap 1 minggu sekali dan dilaksanakan oleh Kepala UTDP Bapelkes Prov.Sumsel, Panitia Pelatihan, MOT Pelatihan, Widyaiswara Pelatihan serta Bendahara Keuangan. Evaluasi kegiatan tidak hanya diperuntukkan pada peserta yang mengikuti pelatihan, namun juga pada fasilitator dan penyelenggara pelatihan. Sebagai upaya yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan pada tim penguji kompetensi, maka dilakukan tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*) serta menguji perbedaan kemampuan tim dari awal kegiatan dan di akhir kegiatan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Hasil penilaian peserta di awal kegiatan dan di akhir kegiatan dapat dilihat pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Peningkatan Pengetahuan Tim Penguji Kompetensi

Hasil grafik pada gambar 2 menyimpulkan bahwa nilai *Pre Test* dan *Post Test* pada tim penguji yang mengikuti pelatihan kompetensi jabatan fungsional kesehatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun nilai rata-rata pada *Pre Test* dan *Post Test* beserta nilai standar deviasi dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Perbandingan Nilai Pada Kegiatan Pelatihan

	Mean	Std. Deviasi	Sig (P-Value)
<i>Pre-Test</i>	64.0	15.31	0,000
<i>Post-Test</i>	90.9	5.33	

Berdasarkan tabel rata-rata nilai, didapatkan bahwa rata-rata nilai pada awal kegiatan yaitu sebesar 64.0 dengan standar deviasi 15.31 serta mengalami peningkatan di akhir kegiatan sebesar 26.9 menjadi 90.9 dengan standar deviasi 5.33. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa melalui pelatihan ini, pengetahuan tim penguji kompetensi mengalami peningkatan secara

signifikan. Sedangkan pada hasil Uji-T tersebut terlihat bahwa nilai P-Value sebesar 0.000, dengan nilai alpha sebesar 0,05 atau 5%, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pada tes awal dan nilai pada tes akhir, dengan kata lain terjadi peningkatan pengetahuan mengenai standar penilaian kompetensi pada tim kompetensi.

Sebuah penelitian mengatakan bahwa pengetahuan merupakan ilmu yang didapat dari sebuah pembelajaran dan pengalaman hidup (Widiastuti, 2019). Pengetahuan didapatkan dari informasi yang diberikan kepada partisipan (Moudy & Syakurah, 2020). Maka dari itu, diperlukan adanya pelatihan kepada tim pengujian kompetensi jabatan fungsional untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya dalam menguji kompetensi yang sesuai standar (Maulyan, 2019). Pada hasil evaluasi kegiatan secara menyeluruh, ditemukan beberapa kendala yang terjadi fasilitator dan penyelenggara kesehatan. Ditemukan bahwa pada fasilitator, masih terdapat kendala dalam penyampaian materi dan kurang baik dalam menguasai ruang sedangkan pada panitia penyelenggara yaitu pada keterlambatan penyediaan konsumsi bagi peserta. Kelebihan serta kekurangan yang terjadi pada kegiatan pelatihan ini dalam dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Kelebihan dan Kekurangan Kegiatan

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Adanya grup whatsapp dimana panitia membantu mengirimkan modul serta materi yang telah disampaikan oleh fasilitator	Konsumsi yang terlambat serta tidak adanya sambungan internet yang dapat diakses kepada peserta
2	Materi pelaksanaan uji kompetensi yang sesuai dan berstandar	Cara perhitungan skor nilai akhir

Tahap pelaporan dilakukan dengan menggabungkan hasil laporan monitoring serta laporan akhir yang berisi seluruh rangkaian kegiatan di mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan (Imron et al., 2019). Format Pelaporan dibuat berdasarkan standar pelaporan pelatihan UPTD Bapelkes Provinsi Sumatera Selatan dan jangka waktu laporan telah di buat maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan pelatihan.

KESIMPULAN

Kegiatan manajemen proyek pelatihan bagi tim pengujian kompetensi jabatan fungsional dilaksanakan akibat masih kurangnya tim pengujian kompetensi serta belum semua pengujian yang telah mengikuti pelatihan yang terstandar. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan manajemen proyek yang terdiri dari tahap inisiasi kegiatan, tahap perencanaan, tahap

implementasi kegiatan, tahap monitoring dan supervisi serta tahap evaluasi dan pelaporan. Implementasi kegiatan dimulai dengan mengadakan pelatihan bagi peserta yang menjadi perwakilan setiap Fasyankes di Sumatera Selatan. Pengetahuan peserta akan dibandingkan melalui tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*). Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan didapatkan bahwa 29 peserta yang mengikuti pelatihan telah mengalami peningkatan pengetahuan mengenai standar kompetensi pada jabatan fungsional. Sedangkan ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatannya pelatihan, yaitu fasilitator yang kurang baik dalam menyampaikan materi serta keterlambatan penyediaan konsumsi bagi peserta. Diharapkan kepada peserta untuk dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama pelatihan serta kepada tim kerja untuk dapat menentukan fasilitator yang lebih luwes dalam menyampaikan materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Pranatawijaya, V. H., & Putra, P. B. A. A. (2021). Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Kegiatan Menggunakan Metode Prototype. *JOINTECOMS (Journal of Information Technology and Computer Science)*, 1(1), 47–57.
- Badan PPSDM Kesehatan. (2020). *Kurikulum Klasikal Pelatihan Uji Kompetensi Bagi Tim Pengujian Jabatan Fungsional Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Imron, Nugroho, I., & Subur. (2019). PKU Dengan Majelis DIKDASMEN PCM Salam: Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Sampah Melalui Pendekatan Berbasis 3R Dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Sehat di SMP Muhammadiyah Salam. *Community Empowerment*, 4(1), 34–40.
- Isra, M. (2022). Analisis dan Prediksi Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Menempati Jabatan Fungsional Menggunakan Algoritma C4.5. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 4(1), 58–63.
- Maulyan, F. F. (2019). Peran Pelatihan Guna Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Karir: Theoretical Review. *Jurnal Sains Manajemen*, 1(1), 40–50.
- Megawaty, D. A. (2020). Sistem Monitoring Kegiatan Akademik Siswa Menggunakan Website. *Jurnal Tekno Kompak*, 14(2), 98. <https://doi.org/10.33365/jtk.v14i2.756>
- Moudy, J., & Syakurah, R. A. (2020). Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia. *Higeia Journal of Public Health Research And Development*, 4(3), 333–346.
- Muslimin. (2020). Program Penilaian Kinerja Guru dan Uji Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Guru. *Indonesian Journal of Education*

MANAJEMEN PROYEK PENINGKATAN PENGETAHUAN PENGUJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN

Management & Administration Review, 4(1), 197–204.

- Novia, D., & Syakurah, R. A. (2022). Analisis Manajemen Program Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Dinas Kesehatan Kota LubukLinggau Terhadap Pengawasan Makanan dan Minuman Yang Beredar di Masyarakat. *Jambi Medical Journal “Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan,”* 10(1), 101–115.
- Nuryanto, Y., Taryana, A., & Sandjaya, T. (2022). Penguatan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Melalui Kebijakan Inpassing di Universitas Padjajaran. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 7–17.
- Pebriyanti, E., & Syakurah, R. A. (2022). Analisis Manajemen Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat Prodi D3 Keperawatan Universitas Bengkulu. *Jurnal Kedokteran Ilmu Nafis*, 11(1), 49–61.
- Permatasari, C., & Ariani, F. (2021). Penyetaraan Pola Karier Pasca Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(2), 151–163.
- Prasanto, H. E. D. (2021). *Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra Perkumpulan Strada Tahun 2016-2024*.
- Tim Website Dinkes. (2020). *Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan*. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
<https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/199/uji-kompetensi-jabatan-fungsional-kesehatan/>
- Timur, T. W. B. K. (2021). *Pelatihan Bagi Penguji Kompetensi Jabatan Kesehatan Tahun 2021*. Bapelkes Kalimantan Timur.
<https://bapelkes.kaltimprov.go.id/pelatihan-bagi-penguji-kompetensi-jabatan-kesehatan-tahun-2021/>
- Widiastuti, E. (2019). Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan, dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Sebagai Strategi Keberlangsungan Usaha Pada UMKM Batik DI Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(1).
<https://doi.org/10.32424/jeba.v21i1.1286>